



**PENETAPAN**

**Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tanggal lahir 11 Juni 1968 /umur 55, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt, tanggal 05 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Danang Xx bin Xx, NIK xx, Tempat tanggal lahir, Magetan, 04 Desember 2004 (umur 18 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx Desa Xx Kecamatan Xx Kabupaten Magetan, dengan calon istrinya bernama Xx binti Xx, NIK xxx, Tempat tanggal lahir, Magetan, 13 Februari 2005 (umur 18 tahun 8 bulan), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di xxx

Hlm.1 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Xx Kecamatan Xx Kabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Magetan ;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Magetan dengan surat penolakan nomor : xxx tanggal 29 September 2023 karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran sejak bulan Juni 2021, bertunangan pada tanggal 16 September 2023 dan pernah berhubungan badan sehingga calon istri hamil 6 bulan yang jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan dengan calon istrinya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Petani mempunyai penghasilan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sedangkan calon istrinya tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan dan mereka berdua siap membangun rumah tangga serta menjadi suami-istri yang baik;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Hlm.2 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, berkenan untuk memanggil Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Danang Xx bin Xx) dengan calon istrinya bernama (Xx binti Xx).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Danang Xx bin Xx dengan calon istrinya bernama Xx binti Xx;

Hlm.3 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt



- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 10 bulan, sedangkan calon istrinya berusia 18 tahun 8 bulan;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
  - Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun dan telah bertunangan sejak 16 September 2023;
  - Bahwa menurut pengakuan anak mereka, anak mereka telah berhubungan badan dengan calon istrinya dan yang menghamili benar-benar anak mereka;
  - Bahwa anak Pemohon siap bertanggungjawab terhadap anak calon istrinya dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - Bahwa Pemohon dan orang tua serta keluarga calon istri anak mereka sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
  - Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istrinya bila lahir tanpa sosok ayah;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
  - Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Danang Xx bin Xx dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:
- Bahwa, benar ia anak Pemohon;

Hlm.4 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia lahir pada tanggal 04 Desember 2004, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa, ia dengan calon istri tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, ia dan calon istrinya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 16 September 2023;
- Bahwa, ia telah berhubungan badan dengan calon istrinya sehingga calon istrinya saat ini hamil dan benar-benar ia yang menghamilinya;
- Bahwa, ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap calon istri dan anak yang dikandung calon isterinya serta telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, sepengetahuannya tidak ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan calon istrinya;
- Bahwa, orang tuanya dan orang tua calon istri sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila ia dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang didikandung calon istrinya;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri bernama Xx binti Xx di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon istri anak Pemohon;
- Bahwa, ia lahir pada tanggal 13 Februari 2005, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon bernama Danang Xx bin Xx yang lahir pada tanggal 04 Desember 2004;

Hlm.5 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt



- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, ia dan calon suaminya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 16 September 2023;
- Bahwa, ia telah berhubungan badan dengan calon suaminya bahkan ia sudah hamil;
- Bahwa, Calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan anak yang ia kandung serta telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, ia tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain, hanya Danang Xx bin Xx yang menghamilinya;
- Bahwa, orang tuanya dan orang tua calon suaminya sudah sepakat setuju untuk menikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa, bila ia dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang ia kandung;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri bernama Suminto bin Saman memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Xx binti Xx dengan anak Pemohon bernama Danang Xx bin Xx;
- Bahwa anak mereka saat ini berusia 18 tahun 8 bulan, sedangkan anak Pemohon baru berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa mereka sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Pemohon;

Hlm.6 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt





- Bahwa Anak mereka dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun dan telah bertunangan sejak 16 September 2023 bahkan anak mereka sekarang sudah hamil dan menurut pengakuan anak mereka yang menghamili anak Pemohon;
- Bahwa menurut pengakuan anak mereka, hanya anak Pemohon yang menghamili anak mereka;
- Bahwa anak mereka telah siap berumah tangga dengan anak Pemohon dan anak Pemohon juga telah siap berumah tangga dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa mereka dan Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak kami bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa anak mereka dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa mereka siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Xx NIK xxx tanggal 01 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta nikah Nomor: xxx tanggal 01 September 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut

Hlm.7 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Surat Keterangan an. Samirah Nomor: xxx tanggal 21 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xx Kecamatan Xx Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Danang Xx NIK xx tanggal 17 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Danang Xx Nomor: 0179/BL/2005 tanggal 07 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Ijazah atas nama Danang Xx Nomor: xxx tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Xx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xx NIK xxx tanggal 17 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;
  9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xx Nomor: xxxx tanggal 16 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Hlm.8 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.12;

10. Fotokopi Surat Keterangan Lulus an. Xx Nomor: xxxx tanggal 05 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Kawedanan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium an. Xx, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Xx Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium an. Xx, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Xx Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Hasil USG, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Danang Xx Nomor: cxxx tanggal 21 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xx, Kecamatan Xx Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Formulir Hasil Konseling Pranikah yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Magetan Nomor: xxx tanggal 05 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Penolakan Nomor: xxxx tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Hlm.9 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.16;

Bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Danang Xx bin Xx adalah anak Pemohon;
- Bahwa, benar Danang Xx bin Xx akan segera menikah dengan Xx binti Xx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 10 bulan, sedangkan calon isterinya berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon telah berhubungan badan dengan calon istrinya dan sekarang calon istri dari anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa, Sepengetahuan saya ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan Xx binti Xx, Danang Xx bin Xx yang menghamili Xx binti Xx;
- Bahwa, Kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon istrinya;
- Bahwa, antara Danang Xx bin Xx dengan Xx binti Xx tidak ada hubungan keluarga / sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Danang Xx bin Xx tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Hlm.10 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt



- Bahwa, sepengetahuan saksi Xx binti Xx tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain atau pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Danang Xx bin Xx dengan Xx binti Xx;
- Bahwa, Sudah siap berumah tangga, karena Danang Xx bin Xx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Danang Xx bin Xx sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Xx binti Xx siap menjadi istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, benar Danang Xx bin Xx adalah anak Pemohon;
- Bahwa, benar Danang Xx bin Xx akan segera menikah dengan Xx binti Xx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 10 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa, saksi pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon telah berhubungan badan dengan calon istrinya dan sekarang calon istri dari anak Pemohon telah hamil;

Hlm.11 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt



- Bahwa, Sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan Xx binti Xx, Danang Xx bin Xx yang menghamili Xx binti Xx;
- Bahwa, kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon isterinya;
- Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, Sudah siap berumah tangga karena Danang Xx bin Xx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Danang Xx bin Xx sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Xx binti Xx siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan Xx binti Xx, Danang Xx bin Xx yang menghamili Xx binti Xx;
- Bahwa, tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Danang Xx bin Xx dengan Xx binti Xx;
- Bahwa, tidak ada hubungan keluarga / sedarah atau sesusuan antara Xx binti Xx dengan Danang Xx bin Xx;
- Bahwa, sepengetahuan saya Danang Xx bin Xx tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, Xx binti Xx tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain atau pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, kedua orang tua dan keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Hlm.12 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt



Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Magetan memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hlm.13 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon pernah berhubungan badan dengan calon istrinya dan sekarang telah hamil 6 bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPP jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah

Hlm.14 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magetan;
2. Bahwa Danang Xx bin Xx adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa Danang Xx bin Xx akan segera menikah dengan Xx binti Xx, akan tetapi Danang Xx bin Xx masih berumur 18 tahun 10 bulan adapun Xx binti Xx berumur 18 tahun 8 bulan;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 16 September 2023
5. Bahwa antara Xx binti Xx dengan Danang Xx bin Xx telah intim dalam pergaulan bahkan anak Pemohon pernah berhubungan badan dengan calon istrinya dan sekarang telah hamil 6 bulan dan yang menghamili adalah benar-benar anak Pemohon bukan pria lain, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon istri anak Pemohon;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Xx binti Xx dan Danang Xx bin Xx menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga,

Hlm.15 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Xx binti Xx siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Danang Xx bin Xx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Danang Xx bin Xx sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

9. Bahwa, antara Xx binti Xx dengan Danang Xx bin Xx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Danang Xx bin Xx tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Xx binti Xx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Xx binti Xx;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Xx binti Xx dengan Danang Xx bin Xx;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magetan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Magetan memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Danang Xx bin Xx, maka

Hlm.16 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 10 bulan tahun, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Magetan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon

Hlm.17 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hlm.18 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dapat menikahi calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Hlm.19 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Danang Xx bin Xx** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Xx binti Xx**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hlm.20 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt





ttd

ttd

**Zainal Abidin, S.H.**

**Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hlm.21 dari 21 hlm. Penetapan No. 148/Pdt.P/2023/PA.Mgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)